

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-168/KN/2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI
SOSIAL

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan atas pedoman pelaksanaan analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial perlu menambahkan analisis dan model baru dalam metode kuantitatif untuk pengukuran dampak ekonomi, sehingga dipandang perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 637);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.06/2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1394).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah secara tim.
- KETIGA : Ruang lingkup pelaksanaan analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA meliputi:
- a. pengelolaan kekayaan negara dimiliki;
 - b. pengelolaan kekayaan negara dikuasai; dan
 - c. pengelolaan aset lainnya.
- KEEMPAT : Pembagian kewenangan pelaksanaan analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial oleh Penilai Pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang penilaian.
- KELIMA : Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, meliputi kegiatan:
- a. mengidentifikasi permohonan/penugasan;
 - b. menentukan tujuan;
 - c. mengumpulkan data dan/atau informasi;
 - d. melakukan analisis; dan
 - e. menyusun laporan.
- KEENAM : Petunjuk teknis pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Hasil pengumpulan data dan informasi dituangkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDELAPAN : Hasil pelaksanaan analisis dituangkan dalam Laporan Analisis sesuai format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KESEMBILAN : Terhadap Laporan Analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN, dilakukan penelaahan (*peer review*) oleh Penilai Pemerintah yang ditunjuk atas konsep laporan analisis yang hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja Penelaahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KESEPULUH Dalam hal diperlukan, pelaksanaan analisis dapat meminta bantuan teknis dan/atau bantuan tenaga dengan mengacu pada ketentuan mengenai bantuan teknis dan bantuan tenaga di bidang penilaian.
- KESEBELAS Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
- Laporan Analisis yang diterbitkan sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah.
 - Pelaksanaan analisis yang sedang dilaksanakan, proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA
BELAS Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada:
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP- /KN/2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS MANFAAT DAN
DAMPAK EKONOMI SOSIAL

BAB I PEDOMAN UMUM

A. Pengertian

1. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan berupa mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan dicari kaitannya kemudian ditafsirkan maknanya.
2. Kekayaan negara dimiliki adalah kekayaan negara yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, termasuk kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola secara korporasi.
3. Kekayaan negara dikuasai adalah kekayaan negara atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta kekayaan lainnya dalam wilayah dan yurisdiksi Republik Indonesia yang dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Aset lainnya adalah aset selain kekayaan negara dimiliki dan/atau dikuasai yang pengelolaannya berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Manfaat Ekonomi adalah manfaat yang diperoleh secara langsung bagi negara dan masyarakat dari objek analisis yang dapat diukur dalam bentuk uang.
6. Manfaat Sosial adalah manfaat yang diperoleh dari objek analisis secara langsung bagi negara dan masyarakat dalam aspek-aspek nonpasar dan tidak dapat diukur dalam bentuk uang.
7. Dampak Ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berfokus pada indikator makroekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator-indikator tersebut bagi negara dan masyarakat.
8. Dampak Sosial adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis yang terjadi pada masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan.
9. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk

atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Umum

1. Ruang lingkup Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial yang selanjutnya disebut objek analisis meliputi:
 - 1) pengelolaan kekayaan negara dimiliki;
 - 2) pengelolaan kekayaan negara dikuasai; dan
 - 3) pengelolaan aset lainnya.
2. Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dilakukan berdasarkan:
 - 1) permohonan dari pengelola barang atau pihak yang memiliki kewenangan; atau
 - 2) penugasan dari Menteri Keuangan dan/atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
3. Pelaksanaan analisis dilakukan secara tim dalam jumlah bilangan ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota.
4. Dalam hal diperlukan, Penilai Pemerintah dapat menggunakan bantuan teknis dan/atau bantuan tenaga dalam pelaksanaan analisis.

C. Tujuan Analisis

Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial bertujuan:

1. untuk mengetahui besaran Manfaat Ekonomi dan Sosial atas pengelolaan kekayaan negara dan aset lainnya; dan/atau
2. untuk mengetahui Dampak Ekonomi dan Sosial pengelolaan kekayaan negara dan aset lainnya terhadap tingkat keseluruhan aktivitas ekonomi dan sosial pada daerah yang terdampak.

BAB II
PERMOHONAN/PENUGASAN
ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL

A. Permohonan

1. Permohonan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial disampaikan oleh pengelola barang atau pihak yang memiliki kewenangan.
2. Permohonan disampaikan secara formal dalam bentuk surat pengantar/permohonan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilengkapi dengan lampiran berupa data dan/atau informasi.
3. Surat pengantar/permohonan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. deskripsi objek;
 - d. jenis pengelolaan kekayaan negara;
 - e. penjelasan tentang rencana pengembangan; dan
 - f. jangka waktu kerjasama atau umur ekonomis bangunan.

B. Data dan/atau informasi

Data dan/atau informasi dalam permohonan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial disampaikan dalam bentuk proposal yang memuat paling sedikit:

1. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
2. Deskripsi objek:
 - a. Untuk objek analisis berupa tanah meliputi luas, lokasi, batas-batas, peta lokasi, foto, tahun perolehan, dan nilai perolehan/nilai buku/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - b. Untuk objek analisis berupa bangunan meliputi luas, lokasi, spesifikasi, foto, tahun bangun, tahun perolehan, dan nilai perolehan/nilai buku/NJOP.
 - c. Untuk objek analisis selain tanah dan bangunan meliputi lokasi, jenis, spesifikasi, foto, tahun perolehan, dan nilai perolehan/nilai buku.
 - d. Untuk objek analisis berupa Sumber Daya Alam meliputi lokasi, peruntukan area, masa berlaku perizinan yang dimiliki, dan luas wilayah usaha/kerja.
3. Rencana pengembangan atas objek analisis di masa mendatang/selama masa proyeksi, paling sedikit memuat:

- a. rencana tapak (*site plan*);
 - b. proyeksi biaya modal (*capital expenditures*); dan
 - c. proyeksi biaya operasional (*operational expenditure*) antara lain biaya pegawai, biaya pemeliharaan, biaya umum dan administrasi, serta biaya pemasaran dan asuransi.
4. Masa proyeksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dihitung dengan berdasarkan jenis kerja sama dan jenis pengelolaan objek analisis. Sebagai contoh:
- a. pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan, maka masa proyeksi adalah selama masa pemanfaatan;
 - b. pengelolaan dalam bentuk pemindahtanganan, maka masa proyeksinya adalah selama usia ekonomis bangunan dan/atau selain bangunan.
5. Deskripsi Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial bagi masyarakat dan negara sebagai dampak pengelolaan kekayaan negara dan aset lainnya.
6. Apabila diperlukan, Penilai Pemerintah dapat meminta kepada pemohon untuk memaparkan (ekspose) rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. Penyampaian Permohonan

1. Permohonan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial disampaikan kepada:
 - a. Direktur untuk kewenangan analisis oleh Penilai Pemerintah di Kantor Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan analisis oleh Penilai Pemerintah di Kantor Wilayah; atau
 - c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan analisis oleh Penilai Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
2. Permintaan kelengkapan data informasi kepada pemohon disampaikan secara formal oleh Penilai Pemerintah dalam hal:
 - a. data dan/atau informasi yang diserahkan belum lengkap; dan/atau
 - b. membutuhkan data dan/atau informasi lebih lanjut sebagai bahan analisis.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui:
 - a. Direktur pada Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, untuk Penilai Pemerintah di Kantor Pusat;

- b. Kepala Kantor Wilayah, untuk Penilai Pemerintah di Kantor Wilayah; atau
 - c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk Penilai Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
4. Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi permintaan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permintaan, tim penilai mengembalikan secara formal permohonan analisis dimaksud.

D. Penugasan

1. Penugasan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial diberikan oleh:
 - a. Menteri Keuangan; dan/atau
 - b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
2. Data dan/atau informasi atas penugasan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial disediakan oleh pihak yang terkait dengan penugasan analisis dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

BAB III
PETUNJUK TEKNIS
ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL

A. Mengidentifikasi Permohonan/Penugasan

Identifikasi terhadap permohonan/penugasan analisis dilakukan dengan cara memeriksa:

1. kelengkapan data dan/atau informasi permohonan/penugasan analisis; dan
2. kebenaran data dan/atau informasi permohonan/penugasan analisis.

B. Menentukan Tujuan Analisis

Setelah permohonan/penugasan dinyatakan lengkap dan benar, maka tim penilai menentukan tujuan permohonan/penugasan analisis sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

C. Mengumpulkan Data dan/atau Informasi

Penilai Pemerintah mempersiapkan pengumpulan data dan/atau informasi dengan mengumpulkan data awal analisis yang berasal dari data dan/atau informasi yang disampaikan dalam permohonan serta data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini. Tim penilai melaksanakan survei lapangan untuk membandingkan data awal dengan kondisi objek analisis dan mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan objek analisis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei lapangan.
 - a. Survei lapangan dapat dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota tim Penilai Pemerintah.
 - b. Tujuan survei lapangan adalah untuk membandingkan data awal dengan kondisi objek analisis dan mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan objek analisis.
 - c. Pengumpulan data dan/atau informasi lain dapat dilakukan dengan cara:
 - a) *focus group discussion/meeting* dengan pihak-pihak terkait;
 - b) wawancara dengan masyarakat sekitar;
 - c) survei pasar; dan/atau
 - d) teknik pengumpulan data lainnya sesuai kebutuhan.

- d. Hasil survei lapangan dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan dengan format dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Tim Penilai Pemerintah dapat tidak melakukan survei lapangan dengan ketentuan:
 - a. Terdapat hal yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan survei lapangan atas objek analisis antara lain:
 - 1) pihak yang menguasai objek analisis tidak kooperatif;
 - 2) adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
 - 3) tidak terjaminnya keamanan/keselamatan; dan/atau
 - 4) terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.
 - b. Tim Penilai Pemerintah menyatakan secara tegas penyebab tidak dapat dilakukannya survei lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Survei Lapangan sesuai dengan format dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - c. Dalam hal Tim Penilai Pemerintah tidak dapat melakukan survei lapangan, Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial tidak dilanjutkan dan permohonan dikembalikan.

D. Melakukan Analisis

Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Manfaat Ekonomi dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yang berisi penjelasan secara kuantitatif manfaat yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Dampak Ekonomi dilakukan dengan metode kuantitatif dengan model Input Output (IO) dan/atau model *Computable General Equilibrium* (CGE). Model IO menekankan pada analisis menggunakan tabel Input Output (IO), sedangkan pada model CGE analisis menggunakan tabel IO dengan menggunakan *software* CGE. Perbedaan antara model IO dengan model CGE adalah:
 - a. Asumsi rasio IO tetap konstan sepanjang periode analisis, sedangkan asumsi rasio CGE lebih dinamis.
 - b. Model IO secara baik menggambarkan hubungan keterkaitan antarsektor, tetapi tidak cukup menggambarkan hubungan respon

perilaku para pelaku ekonomi di dalam perekonomian terutama yang terkait dengan perubahan harga, sedangkan model CGE telah menggambarkan hubungan respon perilaku para pelaku ekonomi di dalam perekonomian terutama yang terkait dengan perubahan harga.

3. Manfaat dan Dampak Sosial dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berisi penjelasan secara naratif Manfaat dan Dampak Sosial yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah.

Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

1. Analisis Manfaat Ekonomi dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif.

Pelaksanaan analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi semua Manfaat Ekonomi yang akan dihasilkan atas objek analisis.
- b. Menghitung besaran Manfaat Ekonomi atas objek analisis selama jangka waktu kerja sama atau umur bangunan dan/atau selain bangunan dengan menggunakan data dan/atau informasi yang berasal dari sumber berupa penelitian pasar, peraturan perpajakan, standar upah regional dan nasional, dan sumber data lainnya.

Contoh perhitungan Manfaat Ekonomi sebagai berikut:

- 1) Penyerapan tenaga kerja.

Besaran Manfaat Ekonominya dapat diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang terserap dikalikan dengan standar upah yang dibayarkan.

- 2) Penghematan biaya operasional kendaraan.

Besaran Manfaat Ekonominya dapat diperoleh dari penghematan bahan bakar dikalikan dengan harga bahan bakar, sebagai contoh dalam proyek pembangunan jalan tol.

- 3) Penghematan waktu perjalanan.

Besaran Manfaat Ekonominya dapat diperoleh dari penghematan waktu perjalanan dikalikan dengan standar upah minimum, sebagai contoh proyek pembangunan jalan tol.

- 4) Penghematan biaya pembelian/penyewaan aset

Besaran Manfaat Ekonomi dapat diperoleh dari penghematan jika dilakukan pembelian/penyewaan aset.

- 5) Penghematan biaya dari penggunaan energi panas bumi bila dibandingkan dengan energi substitusinya.

Besaran Manfaat Ekonominya dapat diperoleh dengan menghitung selisih biaya pembangkitan listrik dari energi substitusi dengan energi panas bumi.

- 6) Pengurangan emisi karbon.

Besaran Manfaat Ekonominya dapat diperoleh dengan menghitung tingkat emisi karbon yang berhasil diturunkan dikalikan dengan harga jual karbon.

- 7) Pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat.

Besaran Manfaat Ekonominya dapat diperoleh dari menghitung besaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh pemerintah pusat.

- 8) Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Besaran Manfaat Ekonominya dapat diperoleh dari menghitung pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk pajak maupun retribusi daerah.

- c. Menentukan besaran tingkat diskonto sosial (*social discount rate*).

Tingkat diskonto sosial adalah besaran yang mencerminkan penilaian relatif dari masyarakat terhadap nilai kini dibandingkan dengan nilainya di masa depan. Beberapa lembaga rujukan untuk menentukan besaran tingkat diskonto sosial berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bank Dunia (*World Bank*), atau Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*).

- d. Menghitung nilai sekarang dari Manfaat Ekonomi dengan menggunakan tingkat diskonto sosial.

2. Analisis Dampak Ekonomi dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan model IO.

Analisis Dampak Ekonomi menggunakan model IO menunjukkan keterkaitan antarsektor yang memiliki ketergantungan sektoral dimana output suatu sektor merupakan input pada sektor lain. Sebagai contoh pada sektor pengolahan gula membutuhkan input dari sektor pertanian tebu yang kemudian menghasilkan output berupa gula. Output sektor pengolahan gula tersebut kemudian digunakan sebagai input bagi industri makanan dan minuman lainnya.

Penggunaan model IO menghasilkan empat analisis yaitu: analisis keterkaitan (*linkage analysis*), analisis dampak penyebaran (*dispersion effect analysis*), analisis pengganda (*multiplier analysis*), dan analisis Dampak Ekonomi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Analisis keterkaitan merupakan suatu konsep yang dijadikan dasar perumusan strategi pembangunan ekonomi dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam suatu sistem perekonomian.
- b. Analisis dampak penyebaran merupakan pengembangan dari analisis keterkaitan dengan cara membandingkan rata-rata dampak yang ditimbulkan oleh suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor.
- c. Analisis pengganda bertujuan mengkaji seberapa besar dampak dari perubahan suatu sektor jika terjadi perubahan dalam variabel-variabel eksogennya.
- d. Analisis Dampak Ekonomi dihitung atas injeksi/*shock* atas output, pendapatan, dan tenaga kerja untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi atas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sebuah proyek.

Model IO adalah model yang sangat mumpuni untuk menggambarkan keterkaitan antarsektor di dalam perekonomian dan untuk mengetahui *multiplier effect* atas suatu kegiatan ekonomi sektoral. Hasil analisis IO menggambarkan hubungan keterkaitan antarsektor, akan tetapi tidak menggambarkan respon perilaku para pelaku ekonomi di dalam perekonomian terutama yang terkait dengan perubahan harga.

Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam analisis input output adalah:

- a. Periode waktu yang mengacu pada tahun tertentu. Sebagai contoh di Indonesia, Tabel IO Tahun 2016 mengacu pada kondisi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut.
- b. Sektor yang mengacu pada unit-unit produksi di suatu wilayah yang menghasilkan barang atau jasa.
- c. Keterkaitan antarsektor yang menunjukkan ketergantungan sektoral.

Pelaksanaan analisis Dampak Ekonomi dengan menggunakan model IO dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi biaya.

Identifikasi biaya atas objek analisis berupa:

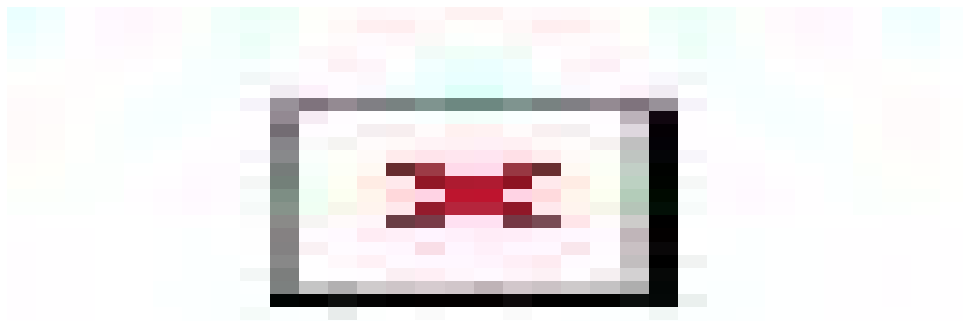
- 1) biaya modal (*capital expenditure*); dan
- 2) biaya operasional (*operasional expenditure*).

Total biaya berupa biaya modal dan biaya operasional selama masa proyeksi akan menjadi input/ *shock* pada analisis Dampak Ekonomi dengan model IO.

b. Menyiapkan tabel IO.

- 1) Analisis dengan model IO menggunakan tabel transaksi atas dasar harga dasar atau produsen terbaru yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebut Tabel IO. Pada transaksi atas dasar harga dasar atau harga produsen yang digunakan sebagai dasar analisis adalah harga dari produsen barang dan jasa yang bersangkutan tanpa margin perdagangan dan biaya pengangkutan serta pajak, dikurangi subsidi atas produk.

Tabel.1 Contoh Tabel IO



- 2) Ketentuan penggunaan Tabel IO sebagai berikut:
 - a) Tabel IO kota/kabupaten di lokasi objek analisis.
 - b) Dalam hal Tabel IO sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tersedia, maka digunakan Tabel IO Provinsi di lokasi objek analisis.
 - c) Dalam hal Tabel IO sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tidak tersedia, maka digunakan Tabel IO Nasional.
- 3) Menentukan tabel IO berdasarkan jumlah sektor yang akan digunakan.

Pada umumnya tabel IO publikasi BPS, terdiri atas 17 sektor, 52 sektor, dan/atau 185 sektor. Semakin banyak sektor yang dipilih maka hasil analisis semakin detail.

- 4) Memilah dan mengidentifikasi kuadran pada tabel IO

Tabel IO terdiri dari empat kuadran yaitu:

- a) Kuadran I (*intermediate quadran*)
- Kuadran pertama menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi. Penggunaan atau konsumsi barang dan jasa adalah penggunaan untuk diproses kembali, baik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Transaksi yang digambarkan dalam kuadran pertama disebut transaksi antara.
- b) Kuadran II (*final demand quadran*)
- Kuadran kedua menunjukkan permintaan akhir (*final demand*). Penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi digolongkan sebagai permintaan akhir yang biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor.
- c) Kuadran III (*primary input quadran*)
- Kuadran ketiga memperlihatkan input primer sektor-sektor produksi. Input ini dikatakan primer karena bukan merupakan bagian dari output suatu sektor produksi seperti pada kuadran pertama dan kedua. Input primer adalah semua balas jasa faktor produksi dan meliputi upah dan gaji, surplus usaha ditambah penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.
- d) Kuadran IV (*primary input – final demand quadran*)
- Kuadran keempat memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi di kuadran keempat ini bukan merupakan tujuan pokok, sehingga dalam penyusunan tabel IO kadang-kadang diabaikan. Demikian juga penyusunan tabel IO di Indonesia mengabaikan kuadran keempat ini. Informasi secara rinci mengenai kuadran keempat disajikan dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

Tabel 2. Kerangka dasar tabel IO

| | |
|---|---|
| Kuadran I Transaksi Antara <i>(intermediate quadran)</i> | Kuadran II Permintaan akhir <i>(final demand quadran)</i> |
| Kuadran III input primer sektor-sektor produksi <i>(primary input quadran)</i> | Kuadran IV input primer permintaan akhir <i>(primary input – final demand quadran)</i> |

Tabel 3. Contoh tabel IO tiga sektor

| Alokasi Output Struktur Input | Permintaan Antara | Permintaan Akhir | Penyediaan | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--|
| | Sektor Produksi | | Impor | Jumlah Output |
| Input Antara | Kuadran I | Kuadran II | | X ₁ X ₂ X ₃ |
| Sektor 1 | x ₁₁ x ₁₂ x ₁₃ | F ₁ | M ₁ | |
| Sektor 2 | x ₂₁ x ₂₂ x ₂₃ | F ₂ | M ₂ | |
| Sektor 3 | x ₃₁ x ₃₂ x ₃₃ | F ₃ | M ₃ | |
| Input Primer | Kuadran III V ₁ V ₂ V ₃ | | | |
| Jumlah Input | X ₁ X ₂ X ₃ | | | |

- c. Menyusun matriks koefisien input/teknologi (teknis) – Matriks A.
- Matriks A merupakan tabel koefisien input tanpa adanya input primer. Oleh karena itu, jumlah baris pada tabel matriks A sama dengan jumlah kolomnya. Ukuran matriks A ditentukan berdasarkan jumlah sektor pada tabel IO yang dipilih, misalnya 17 x 17, 52 x 52, atau 185 x 185. Unsur matriks A dapat dihitung dengan rumus:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

Keterangan:

- i = baris dalam tabel.
- j = kolom dalam tabel.
- a_{ij} = Koefisien input sektor i oleh sektor j.
- x_{ij} = Penggunaan input sektor i oleh sektor j.
- X_j = Total input atau output sektor ke j.

- d. Menyusun matriks identitas - matriks I.
- Matriks identitas (matriks I) yaitu matriks dengan unsur diagonal utama bernilai 1 (satu) dan unsur diagonal lainnya bernilai 0 (nol). Ukuran matriks I ditentukan berdasarkan jumlah sektor pada tabel IO yang dipilih. Adapun yang dimaksud dengan matriks identitas yaitu:

Matriks I = $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- e. Menghitung matriks leontif terbuka- matriks I-A.

Menghitung matriks leontif terbuka dengan cara mengurangkan matriks identitas (matriks I) dengan matriks koefisien input (matriks A), sehingga disebut juga sebagai matriks I-A.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Matriks I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Matriks A} = \begin{pmatrix} 0,05128 & 0,00000 & 0,00000 \\ 0,00000 & 0,09402 & 0,00000 \\ 0,00000 & 0,00000 & 0,18879 \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriks I} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Matriks A} = \begin{pmatrix} 0,05128 & \cdots & 0,0056 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0,00081 & \cdots & 0,2743 \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriks (I - A)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,05128 & 0,00000 & 0,00000 \\ 0,00000 & 0,09402 & 0,00000 \\ 0,00000 & 0,00000 & 0,18879 \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriks (I - A)} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,05128 & \cdots & 0,0056 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0,00081 & \cdots & 0,2743 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0,94872 & 0,00000 & 0,00000 \\ 0,00000 & 0,90598 & 0,00000 \\ 0,00000 & 0,00000 & 0,81121 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0,94872 & \cdots & -0,0056 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -0,00081 & \cdots & 0,7257 \end{pmatrix}$$

- f. Menghitung matriks kebalikan leontif terbuka – *matriks inverse*.

Matriks kebalikan leontif terbuka (*matriks inverse*) merupakan koefisien antara yang menghubungkan antara permintaan akhir dengan output setiap sektor. Hubungan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{X} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{F}$$

Keterangan:

I = matriks identitas

F = permintaan akhir

X = jumlah output

(I-A) = matriks leontif

(I-A)⁻¹ = matriks kebalikan leontif terbuka

- g. Melakukan analisis berdasar model IO.

- 1) Analisis keterkaitan (*linkage analysis*).

Analisis keterkaitan dilakukan untuk melihat keterkaitan antarsektor dalam suatu perekonomian.

Dalam pelaksanaan analisis keterkaitan langsung, input data yang digunakan adalah matriks A. Kemudian untuk keterkaitan langsung dan tidak langsung input data yang digunakan adalah Matriks $(I - A)^{-1}$. Analisis keterkaitan menghasilkan angka yang menunjukkan hubungan antara perubahan permintaan akhir dengan perubahan input dan output yang dibutuhkan atau dialokasikan pada sektor terkait dan sektor-sektor lainnya.

Analisis keterkaitan terdiri atas:

a) keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) atau ke hulu,

Dalam terminologi analisis tabel IO, keterkaitan ke belakang menjelaskan sebagai posisi suatu sektor yang membutuhkan sektor-sektor lainnya. Keterkaitan ke belakang meliputi:

i. Keterkaitan langsung ke belakang memiliki tujuan untuk menunjukkan keterkaitan sektor tersebut secara langsung terhadap sektor-sektor yang digunakan sebagai input. Besaran keterkaitan langsung ke belakang didapat dengan melakukan penjumlahan ke bawah setiap sektor pada matriks koefisien teknis (matriks A) sebagaimana tersaji dalam rumus berikut:

$$KB_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Keterangan:

KB_j = keterkaitan langsung ke belakang sektor j

a_{ij} = unsur matriks koefisien teknis (matriks A)

ii. Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang memiliki tujuan untuk menunjukkan keterkaitan suatu sektor, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sektor hulunya. Besaran keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang didapat dengan melakukan penjumlahan ke bawah setiap sektor pada matriks kebalikan leontif terbuka (Matriks $(I-A)^{-1}$) sebagaimana tersaji dalam rumus berikut:

$$KBLT_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}$$

Keterangan:

$KBLT_j$ = keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor j

α_{ij} = unsur matriks kebalikan leontif model terbuka (matriks $(I-A)^{-1}$)

Hasil analisis keterkaitan ke belakang baik langsung maupun langsung dan tidak langsung digunakan oleh Penilai Pemerintah dalam pemeringkatan untuk mengidentifikasi sektor-sektor hulu yang paling dibutuhkan untuk peningkatan permintaan akhir.

b) keterkaitan ke depan (*forward linkage*) atau ke hilir.

Dalam terminologi analisis tabel IO, keterkaitan ke depan menjelaskan sebagai posisi suatu sektor yang dibutuhkan oleh sektor-sektor lainnya. Keterkaitan ke depan meliputi:

i. Keterkaitan langsung ke depan memiliki tujuan untuk menunjukkan keterkaitan sektor tersebut secara langsung terhadap sektor-sektor yang digunakan sebagai output. Besaran keterkaitan langsung ke depan didapat dengan melakukan penjumlahan ke samping setiap sektor pada matriks koefisien teknis (matriks A) sebagaimana tersaji dalam rumus berikut:

$$KD_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

Keterangan:

KD_i = keterkaitan langsung ke depan sektor i

a_{ij} = unsur matriks koefisien teknis (matriks A)

ii. Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan memiliki tujuan untuk menunjukkan keterkaitan suatu sektor, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sektor hilirnya. Besaran keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan didapat dengan melakukan penjumlahan ke samping setiap sektor pada matriks kebalikan leontif terbuka (Matriks $(I-A)^{-1}$) sebagaimana tersaji dalam rumus berikut:

$$KDLT_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}$$

Keterangan:

$KDLT_i$ = keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor i

α_{ij} = unsur matriks kebalikan leontif model terbuka (matriks $(I-A)^{-1}$)

Hasil analisis keterkaitan ke depan baik langsung maupun langsung dan tidak langsung digunakan oleh Penilai Pemerintah dalam pemeringkatan untuk mengidentifikasi sektor-sektor hilir yang paling dipengaruhi, sebagai akibat peningkatan permintaan akhir.

2) Analisis dampak penyebaran (*Dispersion Effect Analysis*)

Analisis dampak penyebaran merupakan pengembangan dari analisis keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan dan ke belakang. Analisis dampak penyebaran meliputi:

i. Koefisien Penyebaran (*Coefficient on Dispersion*)

Koefisien penyebaran memiliki tujuan untuk mengetahui distribusi manfaat dari pengembangan suatu sektor terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya melalui mekanisme transaksi pasar input. Koefisien penyebaran juga dikenal sebagai daya menarik yaitu kemampuan suatu sektor untuk meningkatkan pertumbuhan industri hulunya. Input data yang digunakan untuk analisis koefisien penyebaran berasal dari matriks $(I-A)^{-1}$, formula perhitungan koefisien penyebaran adalah sebagai berikut:

$$Pd_j = \frac{n \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}}$$

Keterangan:

= koefisien penyebaran sektor j

α_{ij} = unsur matriks kebalikan leontif terbuka

n = jumlah sektor

Hasil dari analisis koefisien penyebaran digunakan oleh Penilai Pemerintah untuk mengukur kemampuan suatu sektor dalam meningkatkan pertumbuhan industri hulunya. Jika nilai koefisien penyebaran lebih dari 1, maka sektor tersebut memiliki kemampuan yang kuat, sedangkan jika kurang dari 1, maka kemampuannya lemah.

ii. Kepekaan Penyebaran (*Sensitivity of Dispersion*)

Kepekaan penyebaran memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya melalui mekanisme pasar output. Kepekaan penyebaran juga dikenal sebagai daya mendorong yaitu kemampuan suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor lain yang memakai output dari sektor ini. Input data yang digunakan untuk analisis koefisien penyebaran berasal dari matriks $(I-A)^{-1}$, formula perhitungan kepekaan penyebaran adalah sebagai berikut:

$$Sd_i = \frac{n \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}}$$

Keterangan:

= kepekaan penyebaran sektor i

α_{ij} = unsur matriks kebalikan leontif terbuka

n = jumlah sektor

Hasil dari analisis kepekaan penyebaran digunakan oleh Penilai Pemerintah untuk mengukur kemampuan suatu sektor dalam meningkatkan pertumbuhan industri hilirnya. Jika nilai kepekaan penyebaran lebih dari 1, maka sektor tersebut memiliki kemampuan yang kuat, sedangkan jika kurang dari 1, maka kemampuannya lemah.

3) Analisis Angka Pengganda (*Multiplier Effect*)

Analisis angka pengganda adalah analisis yang dilakukan untuk melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen (output sektoral) apabila terjadi perubahan pada variabel-variabel eksogen, seperti permintaan akhir di dalam perekonomian. Angka pengganda berguna sebagai indikator dalam pengambilan kebijakan pada sektor tertentu, sebagai contoh penambahan atau pengurangan konsumsi akhir suatu sektor bagaimana pengaruhnya dalam peningkatan atau pengurangan output, pendapatan, dan tenaga kerja, sehingga penting untuk mengalokasikannya untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Analisis angka pengganda (*multiplier effect*) menghasilkan 3 (tiga) jenis angka pengganda yaitu:

a) Angka Pengganda Output (*Output Multiplier*)

Angka pengganda output digunakan untuk mengukur perubahan output akibat adanya tambahan permintaan akhir (*final demand*) sebesar 1 (satu) unit satuan moneter di satu sektor tertentu. Langkah-langkah dalam menentukan angka pengganda output adalah:

- i. Menentukan efek awal output yang bernilai 1 dan mencerminkan posisi saat ini jika terjadi kenaikan satu output.
- ii. Menentukan efek putaran pertama output yang ditunjukkan oleh koefisien langsung (koefisien input-output) dengan cara menjumlahkan secara vertikal unsur pada matriks A.
- iii. Menentukan multiplier output sederhana dengan menjumlahkan seluruh sektor secara vertikal pada matriks $(I-A)^{-1}$
- iv. Menentukan efek dukungan industri output dengan cara mengurangi multiplier output sederhana dengan efek awal output dan efek putaran pertama output.
- v. Menentukan angka pengganda output dengan menjumlahkan efek awal output, efek putaran pertama output, dan efek dukungan industri output kemudian dibagi dengan efek awal output.

b) Angka Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*)

Angka pengganda pendapatan digunakan untuk mengukur peningkatan pendapatan sebagai akibat adanya tambahan output sebesar 1 (satu) unit satuan moneter di satu sektor tertentu. Langkah-langkah dalam menentukan angka pengganda pendapatan adalah:

- i. Menentukan koefisien upah/gaji (h) atau efek awal pendapatan dengan membagi besar kompensasi tenaga kerja dengan total input.
- ii. Menentukan efek putaran pertama pendapatan dengan mengalikan matriks koefisien upah/gaji (efek awal pendapatan) dengan matriks A.
- iii. Menentukan multiplier pendapatan sederhana dengan mengalikan matriks koefisien upah/gaji (efek awal pendapatan) dengan matriks $(I-A)^{-1}$.

- iv. Menentukan efek dukungan industri pendapatan dengan mengurangi multiplier pendapatan sederhana dengan koefisien upah/gaji dan efek putaran pertama pendapatan.
 - v. Menentukan angka pengganda pendapatan dengan menambahkan koefisien upah/gaji (efek awal pendapatan) dengan efek putaran pertama pendapatan dan efek dukungan industri pendapatan kemudian dibagi dengan koefisien upah/gaji (efek awal pendapatan).
- c) Angka Pengganda Tenaga Kerja (*Labor Multiplier*)
- Angka pengganda tenaga kerja digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah tenaga kerja sebagai akibat adanya tambahan output sebesar 1 (satu) unit satuan moneter di satu sektor tertentu. Langkah-langkah dalam menentukan angka pengganda pendapatan adalah:
- i. Mencari informasi data tenaga kerja pada masing masing sektor.
 - ii. Menentukan koefisien kesempatan kerja (e) atau efek awal tenaga kerja dengan membagi data tenaga kerja dengan total input.
 - iii. Menentukan efek putaran pertama tenaga kerja dengan mengalikan matriks koefisien kesempatan kerja dengan matriks A.
 - iv. Menentukan multiplier tenaga kerja sederhana dengan mengalikan matriks koefisien kesempatan kerja (efek awal tenaga kerja) dengan matriks $(I-A)^{-1}$.
 - v. Menentukan efek dukungan industri tenaga kerja dengan mengurangi multiplier tenaga kerja sederhana dengan koefisien kesempatan kerja dan efek putaran pertama tenaga kerja.
 - vi. Menentukan angka pengganda tenaga kerja dengan menambahkan koefisien kesempatan kerja (efek awal tenaga kerja) dengan efek putaran pertama tenaga kerja dan efek dukungan industri tenaga kerja kemudian dibagi dengan koefisien kesempatan kerja (efek awal tenaga kerja).

Tabel 3. Rumus Angka Pengganda

| Nilai | Angka Pengganda | | |
|------------------------|---|--|--|
| | Output | Pendapatan | Tenaga Kerja |
| Efek Awal | 1 | h_j | e_j |
| Efek Putaran Pertama | $\sum_i a_{ij}$ | $\sum_i a_{ij} h_i$ | $\sum_i a_{ij} e_i$ |
| Efek Dukungan Industri | $\sum_i \alpha_{ij} - 1 - \sum_i a_{ij}$ | $\sum_i \alpha_{ij} h_i - h_j - \sum_i a_{ij} h_i$ | $\sum_i \alpha_{ij} e_i - e_j - \sum_i a_{ij} e_i$ |
| Angka Pengganda | $\frac{(\text{Efek Awal} + \text{Efek Putaran Pertama} + \text{Efek Dukungan Industri})}{\text{Efek Awal}}$ | | |

h. Menghitung Dampak Ekonomi

Tim Penilai Pemerintah menghitung Dampak Ekonomi sebagai akibat dari injeksi/ *shock* atas output, pendapatan, dan tenaga kerja untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi atas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sebuah proyek dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi injeksi/ *shock* pada tiap sektor yang terkait.
- 2) Membuat tabel Dampak Ekonomi output, pendapatan, dan tenaga kerja yang terdiri dari kolom sektor, kolom matriks yang berisikan perubahan pada sisi permintaan atau injeksi dan kolom matriks dampak.
- 3) Menghitung Dampak Ekonomi terhadap pembentukan output.
- 4) Menghitung Dampak Ekonomi terhadap pendapatan.
- 5) Menghitung dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Analisis Dampak Ekonomi dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan model CGE (*Computable General Equilibrium*).

Penilai Pemerintah dapat menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) dalam menganalisis Dampak Ekonomi. Model CGE merupakan suatu model ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis dampak perubahan kebijakan terhadap variabel-variabel ekonomi. Model CGE mempunyai keunggulan sebagai berikut:

- a. memiliki mekanisme harga pada model;
- b. memiliki konsistensi sektoral dan hubungan yang jelas antara variabel mikro-makro; dan
- c. memiliki landasan teoritis yang kuat.

Model CGE merupakan model keseimbangan umum yang memodelkan para pelaku atau agen-agen yang terlibat dalam suatu perekonomian beserta dengan interaksi *behaviour*-nya masing-masing. Berbagai agen dalam perekonomian tersebut akan saling berinteraksi sampai terbentuknya suatu kondisi keseimbangan umum (*general equilibrium*) di setiap pasar yang ada dalam perekonomian. Interaksi para pelaku ekonomi dituangkan dalam bentuk persamaan yang diturunkan dari berbagai pola hubungan menurut teori ekonomi yang ada. Dengan menangkap interaksi di antara agen-agen dalam perekonomian, akan didapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan dalam perekonomian.

Model CGE menganalisis sensitivitas dari alokasi sumber daya karena adanya perubahan eksternal. Data dalam model CGE meliputi parameter elastisitas dan input output data yang menunjukkan keterkaitan antarsektor sehingga dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap perubahan sektoral. Sistem persamaan model CGE adalah:

- a. Blok produksi: mencerminkan struktur kegiatan produksi dan perilaku produsen.
- b. Blok institusi: mencerminkan perilaku rumah tangga dan institusi lainnya.
- c. Blok ekspor dan impor: menggambarkan keputusan dalam mengekspor/mengimpor barang dan jasa.
- d. Blok keseimbangan pasar: persamaan-persamaan dalam blok ini menentukan kondisi keseimbangan pasar untuk tenaga kerja, barang dan jasa dalam perekonomian.

Terdapat dua hal yang menjadi representasi terpenting Model CGE yaitu:

- a. Sistem persamaan yang merepresentasikan agen-agen ekonomi di mana keputusan optimal terdapat di *competitive market economy*.
- b. Banyaknya persamaan *First Order Conditions* (FOC) yang mengharuskan kita bisa melakukan derivasi matematika dan mengambil FOC-nya.

Model CGE dapat digunakan ketika menganalisis kebijakan yang meliputi berbagai sektor dengan cara yang berbeda atas dampak kebijakan pada berbagai sektor, wilayah, input (tenaga kerja, lahan, modal), dan tipe rumah tangga. Sebagai contoh kebijakan (tarif atau subsidi) yang menguntungkan satu sektor, tapi merugikan sektor lainnya.

Dalam penggunaan model CGE dibutuhkan data dasar, sumber data utama yang diperlukan untuk membangun model CGE adalah tabel IO. Terdapat beberapa *software/platform* yang bisa digunakan untuk melakukan analisis Dampak Ekonomi menggunakan model CGE antara lain GEMPACK dan GAMS, namun pada dasarnya model CGE memiliki struktur dan sistem persamaan yang sama. Unsur-unsur utama pembentuk model CGE dapat diringkas menjadi beberapa kategori, antara lain: *Set, Parameter, Equation, Closure, dan Shock*. Unsur-unsur tersebut memiliki tugas masing-masing dalam membentuk sistem persamaan matematis dalam model CGE.

Tahapan menyusun model CGE adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun data dasar yang bersumber dari tabel IO.

Data tabel IO dalam bentuk *spreadsheet* disusun menggunakan teknik dengan mengonversi *spreadsheet* ke program *software* yang dipilih sehingga siap digunakan.

- b. Mengadopsi/menyusun/modifikasi model dalam sistem persamaan matematika ekonomi.

Setelah dilakukan penyusunan data dasar, tahap selanjutnya adalah menentukan model dalam sistem atau melakukan adopsi model yang sudah ada dan memodifikasi variabel.

- c. Memastikan model dapat mencari solusi dari sistem persamaan kalibrasi, *closure* dan pengujian.

Kalibrasi dalam model CGE adalah proses penyesuaian parameter dan variabel dalam model untuk mencapai hasil yang sesuai dengan situasi atau data ekonomi yang sebenarnya. Model CGE adalah alat analisis ekonomi yang digunakan untuk memahami dampak perubahan kebijakan ekonomi, perdagangan, atau perubahan dalam ekonomi suatu negara atau wilayah. Proses kalibrasi dalam model CGE adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa model dapat memberikan hasil yang relevan dan dapat diandalkan untuk analisis kebijakan ekonomi dan perencanaan. Dengan melakukan kalibrasi yang baik, dapat meningkatkan ketepatan model CGE dalam menggambarkan dinamika ekonomi suatu negara atau wilayah. Langkah-langkah umum dalam proses kalibrasi dalam model CGE adalah:

- 1) Identifikasi Data dan Parameter

Mengidentifikasi data dan parameter yang diperlukan dalam model, termasuk data makroekonomi seperti PDB, impor, ekspor, tingkat konsumsi, investasi, dan parameter elastisitas. Data ini harus sesuai dengan keadaan ekonomi yang ingin dijalankan modelnya.

2) Penyesuaian Parameter

Menentukan nilai awal parameter dalam model CGE. Parameter-parameter ini mencakup tingkat elastisitas substitusi antara barang, parameter produksi, dan lainnya.

3) Kalibrasi Model

Menjalankan model CGE dengan parameter awal, dan membandingkan hasil model dengan data empiris atau hasil pengamatan aktual. Perbandingan ini dapat mengungkapkan sejauh mana model awal cocok dengan situasi ekonomi yang sesungguhnya.

4) Penyesuaian Parameter Lanjutan

Apabila hasil model awal tidak cocok dengan data aktual, langkah selanjutnya dengan melakukan penyesuaian parameter lebih lanjut. Penyesuaian ini dapat melibatkan perubahan elastisitas substitusi, parameter produksi, atau komponen lainnya dalam model.

5) Validasi Model

Setelah penyesuaian parameter, validasi model dengan data ekonomi aktual. Proses ini mungkin perlu diulangi beberapa kali hingga model memberikan hasil yang sesuai dengan realitas ekonomi.

6) Sensitivitas

Selain kalibrasi utama, Langkah selanjutnya dengan melakukan analisis sensitivitas dengan mengubah parameter-parameter tertentu untuk memahami sejauh mana perubahan dalam parameter tersebut memengaruhi hasil model.

Closure dalam model CGE mengacu pada serangkaian asumsi dan batasan yang dikenakan pada model untuk memastikan bahwa model tersebut konsisten secara internal dan dapat dipecahkan secara matematis. Aturan *closure* ini penting untuk menentukan bagaimana berbagai sektor ekonomi, agen, dan pasar berinteraksi satu sama lain dalam model. Pilihan aturan *closure* dapat berdampak

signifikan terhadap hasil dan interpretasi model. Beberapa jenis *closure* dalam model CGE adalah *market closure*, *budget closure*, *production closure*, dan *trade closure*.

Pengujian dalam model CGE adalah tahap penting dalam pengembangan dan validasi model. Tujuan pengujian adalah untuk memastikan bahwa model memberikan hasil yang konsisten dengan data empiris dan dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi dengan baik.

d. Pengecekan model melalui simulasi.

Pengecekan model dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya data yang digunakan. Pada saat dilakukan simulasi akan terlihat apakah data seimbang sehingga sudah tidak ada selisih yang mengindikasikan bahwa data telah layak.

Hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan analisis Dampak Ekonomi menggunakan model CGE yaitu berupa variabel variabel makroekonomi berupa kenaikan atau penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi, investasi, inflasi, *Government Expenditure* (pengeluaran pemerintah), dan lain lain.

4. Analisis Manfaat Sosial dengan metode deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berisi penjelasan secara naratif sektor-sektor sosial dalam masyarakat yang memperoleh manfaat atas proyek atau kebijakan. Tata cara penerapan metode deskriptif kualitatif pada Manfaat Sosial adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan Manfaat Sosial.

Contoh:

- 1) Meningkatkan kelancaran lalu lintas pada pembangunan jalan tol.
- 2) Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa pada pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, bandar udara, pelabuhan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada pembangunan rumah sakit/fasilitas kesehatan.
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan pada pembangunan fasilitas air bersih.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan pada pembangunan sarana pendidikan.

- 6) Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pada pembangunan kantor pemerintah.
 - 7) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pengguna energi panas bumi.
 - b. Sumber data untuk mengidentifikasi dan menghitung Manfaat Sosial diantaranya adalah penelitian pasar dan sumber data lainnya.
 - c. Faktor yang dideskripsikan dalam Manfaat Sosial adalah faktor yang tidak termasuk dalam perhitungan Manfaat Ekonomi.
5. Analisis Dampak Sosial dengan metode deskriptif kualitatif
- Pelaksanaan analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berisi penjelasan secara naratif sektor-sektor sosial dalam masyarakat yang terdampak atas proyek atau kebijakan. Tata cara penerapan metode deskriptif kualitatif pada Dampak Sosial adalah sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan Dampak Sosial.
Contoh:
 - 1) Memperkecil ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada daerah terdampak.
 - 2) Mempercepat perkembangan wilayah terdampak.
 - 3) Meningkatkan indeks pembangunan manusia.
 - 4) Memperpanjang usia harapan hidup.
 - 5) Menurunkan tingkat pengangguran.
 - b. Sumber data untuk mengidentifikasi dan menghitung Dampak Sosial diantaranya adalah penelitian pasar dan sumber data lainnya.
 - c. Faktor yang dideskripsikan dalam Dampak Sosial adalah faktor yang tidak termasuk dalam perhitungan Dampak Ekonomi.
6. Teknis pengumpulan data penunjang analisis atas Manfaat dan Dampak Sosial
- Pelaksanaan analisis atas Manfaat dan Dampak Sosial dengan metode deskriptif kualitatif, ditujukan untuk menggambarkan adanya Manfaat dan Dampak Sosial terhadap subjek penelitian pada lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain: wawancara, observasi, *Focused Group Discussion* (FGD), dan survei menggunakan kuesioner.
- a. Wawancara
Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan tidak

direkayasa, dengan arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* (kepercayaan) sebagai landasan utama dalam proses memahami. Bentuk wawancara antara lain wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

b. Observasi

Observasi merupakan proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilakukan kepada sebuah kelompok yang sengaja didesain oleh peneliti untuk mendapatkan suatu data tertentu. Dalam FGD, dibutuhkan homogenitas yakni kemiripan atau kecenderungan kesamaan antaranggota responden FGD. FGD dapat juga disebut sebagai wawancara kelompok.

d. Kuesioner/Angket

Kuesioner/angket merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih (responden) melalui wawancara langsung atau tidak langsung. Kuesioner/angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur. Kuesioner/angket sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar.

E. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan hasil analisis berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.

F. Laporan Analisis, disampaikan kepada pemohon analisis melalui:

1. Direktur, untuk pelaksanaan analisis di Kantor Pusat;
2. Kepala Kantor Wilayah, untuk pelaksanaan analisis di Kantor Wilayah; atau
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk pelaksanaan analisis di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



FORMAT BERITA ACARA

1. Format Berita Acara Survei Lapangan

..... (1).....

BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

Nomor: BASL - ...(2).../...(3).../...(4)...

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., Penilai Pemerintah dari(7)..... sesuai Surat Tugas nomor(8)..... tanggal(9)..... telah melakukan survei lapangan secara peninjauan langsung atas objek analisis pada tanggal(10)..... sampai dengan(11)....., berupa(12)..... terletak di(13)..... dengan hasil sebagai berikut:

.....(14)

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

| | |
|----------------|----------------|
| Tim Penilai : | Mengetahui |
| 1. | 1. |
|(15)..... |(16)..... |
| 2. | 2. |
|(15)..... |(16)..... |
| 3. | |
|(15)..... | |

Keterangan:

(1) diisi kop Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.

(2) diisi nomor urut berita acara survei lapangan.

- (3) diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan/
Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (4) diisi tahun survei lapangan dilaksanakan.
- (5) diisi nama hari saat penandatanganan Berita Acara Survei
Lapangan.
- (6) diisi tanggal, bulan, dan tahun saat penandatanganan Berita Acara
Survei Lapangan.
- (7) diisi nama Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (8) diisi nomor surat tugas.
- (9) diisi tanggal surat tugas.
- (10) diisi dengan tanggal awal pelaksanaan survei lapangan.
- (11) diisi dengan tanggal akhir pelaksanaan survei lapangan.
- (12) diisi uraian singkat Objek Analisis.
- (13) diisi lokasi Objek Analisis berada.
- (14) diisi uraian hasil survei lapangan.
- (15) diisi tanda tangan dan nama anggota Penilai Pemerintah yang
melaksanakan survei lapangan.
- (16) diisi tanda tangan, nama, dan jabatan pendamping/saksi yang
mengetahui pelaksanaan survei lapangan.

2. Format Berita Acara Tidak Dapat Melaksanakan Survei Lapangan

..... (1).....

BERITA ACARA TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN SURVEI LAPANGAN

Nomor: BATSL - ...(2).../...(3).../...(4)...

Pada hari(5).... tanggal(6)...., Penilai Pemerintah dari(7).... sesuai Surat Tugas nomor(8).... tanggal(9).... dengan ini menyatakan bahwa kami tidak dapat melakukan survei lapangan atas objek analisis berupa(10).... terletak di(11)...., karena:(12)

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

| Tim Penilai | Mengetahui |
|----------------------|----------------------|
| 1.(13)..... | 1.(14)..... |
| 2.(13)..... | 2.(14)..... |
| 3.(13)..... | |

Keterangan

- (1) diisi kop Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (2) diisi nomor urut berita acara tidak dapat melakukan survei lapangan.
- (3) diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (4) diisi tahun berita acara dibuat.
- (5) diisi nama hari saat berita acara dibuat.
- (6) diisi tanggal, bulan, dan tahun saat berita acara dibuat.
- (7) diisi nama Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.

- (8) diisi nomor surat tugas.
- (9) diisi tanggal surat tugas.
- (10) diisi uraian singkat objek analisis.
- (11) diisi lokasi objek analisis berada.
- (12) diisi penyebab tidak dapat dilaksanakannya survei lapangan.
- (13) diisi tanda tangan dan nama anggota Penilai Pemerintah yang tidak dapat melaksanakan survei lapangan.
- (14) diisi tanda tangan, nama, dan jabatan pendamping/saksi yang mengetahui penyebab tidak dapat dilaksanakannya survei lapangan.

3. Format Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data

..... (1).....

BERITA ACARA TAMBAHAN KEBUTUHAN DATA

Nomor: BATKD- ...(2).../...(3).../...(4)...

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., Penilai Pemerintah dari(7)..... sesuai Surat Tugas nomor(8)..... tanggal(9)..... telah melakukan survei lapangan atas objek analisis pada tanggal(10)..... sampai dengan(11)....., berupa(12)..... terletak di(13)....., sesuai Berita Acara Survei Lapangan nomor(14).... tanggal(15)...., diketahui bahwa masih terdapat data pendukung analisis yang perlu ditambahkan sebagai berikut:

.....(16).....

Berhubung dengan pentingnya data dimaksud bagi proses penyelesaian laporan analisis, data pendukung dimaksud agar segera dilengkapi dan disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apabila data pendukung dimaksud tidak segera dilengkapi dan disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Berita Acara ini ditandatangani, analisis tidak dapat dilanjutkan dan berkas permohonan analisis dikembalikan.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

| Tim Penilai | Mengetahui |
|----------------|----------------|
| 1. | 1. |
|(17)..... |(18)..... |
| 2. | 2. |
|(17)..... |(18)..... |
| 3. | |
|(17)..... | |

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. (19)

2. (19)

Keterangan

- (1) diisi kop Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (2) diisi nomor urut berita acara tambahan kebutuhan data.
- (3) diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (4) diisi tahun berita acara dibuat.
- (5) diisi nama hari saat berita acara dibuat.
- (6) diisi tanggal, bulan, dan tahun saat berita acara dibuat.
- (7) diisi nama Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.
- (8) diisi nomor surat tugas.
- (9) diisi tanggal surat tugas.
- (10) diisi dengan tanggal awal pelaksanaan survei lapangan.
- (11) diisi dengan tanggal akhir pelaksanaan survei lapangan.
- (12) diisi uraian singkat objek analisis.
- (13) diisi lokasi objek analisis berada.
- (14) diisi nomor berita acara survei lapangan.
- (15) diisi tanggal berita acara survei lapangan.
- (16) diisi dokumen yang tidak lengkap.
- (17) diisi tanda tangan dan nama anggota Penilai Pemerintah yang melaksanakan survei lapangan.
- (18) diisi tanda tangan, nama, dan jabatan pendamping/saksi yang mengetahui data yang perlu ditambahkan.
- (19) diisi nama Kementerian/Lembaga atau instansi yang mengajukan permohonan analisis atau pihak terkait.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAPORAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL

- A. Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Analisis dan ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- B. Laporan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal analisis.
- C. Nilai yang dimuat dalam Laporan Analisis menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal perhitungan nilai menggunakan satuan mata uang asing, hasil perhitungan disajikan dalam satuan mata uang asing dan mata uang rupiah. Konversi mata uang asing menjadi mata uang rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal analisis.
- D. Laporan Analisis, memuat antara lain:
 - 1. Halaman Judul.
 - 2. Surat Pengantar.
 - 3. Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar.
 - 4. Asumsi dan Syarat yang Membatasi.
 - 5. Bab I Pendahuluan.
 - 6. Bab II Deskripsi Umum.
 - 7. Bab III Analisis Data.
 - 8. Bab IV Simpulan.
 - 9. Lampiran.
- E. Halaman judul memuat antara lain:
 - 1. Nomor laporan.
 - 2. Tanggal laporan.
 - 3. Jenis objek analisis.
 - 4. Nama pemilik/pengguna.
 - 5. Alamat objek analisis.
 - 6. Logo Kementerian Keuangan.
 - 7. Tanggal analisis.
 - 8. Nama Kementerian, unit eselon I dan instansi vertikal penilai Direktorat Jenderal.
 - 9. Laporan Analisis diberi sampul berwarna hijau.

F. Surat Pengantar memuat antara lain:

1. Ditujukan kepada pemohon.
2. Dasar pelaksanaan analisis.
3. Tujuan pelaksanaan analisis.
4. Alamat objek analisis.
5. Tanggal analisis.
6. Hasil analisis.
7. Tanda tangan ketua tim.

G. Asumsi dan syarat yang membatasi memuat antara lain:

1. Pernyataan atau asumsi mengenai sumber data dan informasi yang digunakan.
2. Pernyataan atau asumsi mengenai objek analisis.
3. Pernyataan atau asumsi terkait peraturan perundang-undangan.
4. Mata uang yang digunakan.
5. Kerahasiaan laporan.
6. Penggunaan laporan.

H. Bab I Pendahuluan, memuat antara lain:

1. Latar belakang yang memuat dokumen permohonan analisis.
2. Dasar hukum analisis yang menjelaskan tentang tim yang melaksanakan analisis dan surat tugas yang mendasari.
3. Survei lapangan yang memuat tanggal pelaksanaan survei lapangan. Tanggal analisis ditetapkan berdasarkan tanggal terakhir survei lapangan.
4. Tujuan analisis yang menjelaskan tujuan dilakukannya analisis secara ringkas.

I. Bab II Deskripsi Umum, memuat antara lain:

1. Data umum, yang memuat antara lain gambaran secara geografis dan data makro ekonomi kabupaten/kota lokasi objek analisis.
2. Data khusus, yang memuat deskripsi objek analisis antara lain lokasi, jenis, ukuran/luas/volume, status, dan dokumen kepemilikan.

J. Bab III Analisis Data, memuat antara lain:

1. Metode analisis, menjelaskan metode yang digunakan dan tahapan dalam proses analisis.
2. Pengumpulan data, menjelaskan waktu pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data.
3. Penjelasan hasil analisis data.

K. Bab IV Simpulan, memuat antara lain:

1. besaran Manfaat Ekonomi;
2. besaran Dampak Ekonomi;
3. deskripsi Manfaat dan Dampak Sosial; dan
4. nama dan tanda tangan Penilai Pemerintah.

L. Lampiran, memuat dokumen-dokumen pendukung analisis antara lain:

1. Dokumen permohonan analisis.
2. Surat tugas.
3. Berita acara survei lapangan.
4. Berita acara tambahan kebutuhan data.
5. Peta lokasi.
6. Dokumen kepemilikan.
7. Analisis perhitungan.

Analisis ini hanya dilampirkan pada laporan pertinggal, sedangkan yang disampaikan kepada pemohon tidak dilampirkan. Dalam hal diperlukan, Penilai Pemerintah memberikan penjelasan analisis perhitungan.

8. Data/informasi lain yang terkait.

M. Format Penomoran Laporan

1. Kantor Pusat

Nomor: LAP- (a)/KN.(b)/AMD/(c)

- (a) Nomor urut laporan
- (b) Kode Direktorat
- (c) Tahun berjalan

2. Kantor Wilayah

Nomor: LAP- (a)/WKN.(b)/AMD/(c)

- (a) Nomor urut laporan
- (b) Kode Kantor Wilayah
- (c) Tahun berjalan

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Nomor: LAP- (a)/KNL.(b)/AMD/(c)

- (a) Nomor urut laporan
- (b) Kode Kantor Pelayanan
- (c) Tahun berjalan

N. Tanggal Laporan Analisis.

Tanggal Laporan Analisis adalah tanggal penyelesaian Laporan Analisis.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

FORMAT KERTAS KERJA PENELAAHAN (PEER REVIEW)

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ...(NAMA UNIT PENYELENGGARA PEMAPARAN)... | | | |
| KERTAS KERJA PENELAAHAN KONSEP LAPORAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL | | | | |
| Jenis Objek | : | ...(Jenis Objek Analisis)... | | |
| Pemilik/Pengguna Objek | : | ...(Pemilik/Pengguna Objek Analisis)... | | |
| Alamat Objek | : | ...(Alamat Objek Analisis)... | | |
| Tim Penilai | : | ...(Daftar Nama Tim Penilai)... | | |
| I. Kewenangan Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dan Kewenangan Penilai Pemerintah | | | | |
| Kewenangan Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial | <input type="checkbox"/> | Sesuai | <input type="checkbox"/> | Belum Sesuai |
| Kewenangan Penilai Pemerintah | <input type="checkbox"/> | Sesuai | <input type="checkbox"/> | Belum Sesuai |
| II. Administrasi Laporan Analisis | | | | |
| No | Keterangan | Pemeriksaan | | |
| 1. | HALAMAN JUDUL | | | |
| a. | Format Penomoran Laporan Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| b. | Jenis Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| c. | Nama Pemilik/Pengguna Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| d. | Alamat Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| e. | Logo Kementerian Keuangan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| f. | Tanggal Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| g. | Instansi/Unit Kerja Asal Penilai | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> ... | | | | |
| 2. | PENGANTAR DAN DAFTAR ISI | | | |
| a. | Pemohon Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| b. | Surat Permohonan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| c. | Uraian dan Alamat Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| d. | Tujuan Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| e. | Tanggal Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| f. | Hasil Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| g. | Daftar Isi | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> ... | | | | | |
| 3. | PERNYATAAN PENILAI PEMERINTAH | | | | |
| a. | Pernyataan Penilai Pemerintah | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> ... | | | | | |
| 4. | ASUMSI DAN SYARAT PEMBATAS | | | | |
| a. | Asumsi dan Syarat Pembatas | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> ... | | | | | |
| 5. | RINGKASAN ANALISIS | | | | |
| a. | Ringkasan Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> ... | | | | | |
| 6. | LINGKUP PENUGASAN | | | | |
| a. | Dasar Penugasan | | | | |
| | 1) Surat Keputusan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| | 2) Surat Tugas | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| b. | Uraian dan Deskripsi Objek | | | | |
| | 1) Legalitas Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| | 2) Lokasi Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| | 3) Deskripsi dan Identifikasi Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| c. | Jenis Mata Uang | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| d. | Tujuan Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| e. | Tanggal Survei Lapangan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| f. | Tanggal Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> ... | | | | | |
| 7. | TAHAPAN ANALISIS | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Tahapan Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> | | | | | |
| ... | | | | | |
| 8. | ANALISIS MANFAAT EKONOMI | | | | |
| | Analisis Manfaat Ekonomi | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> | | | | | |
| ... | | | | | |
| 9. | ANALISIS DAMPAK EKONOMI | | | | |
| | Analisis Dampak Ekonomi | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> | | | | | |
| ... | | | | | |
| 10. | ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK SOSIAL | | | | |
| | Analisis Manfaat dan Dampak Sosial | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> | | | | | |
| ... | | | | | |
| 11. | KESIMPULAN ANALISIS | | | | |
| | Kesimpulan Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> | | | | | |
| ... | | | | | |
| 12. | LAMPIRAN | | | | |
| a. | Surat Permohonan/ Penugasan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| b. | Fotokopi Surat Keputusan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| c. | Fotokopi Surat Tugas | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| d. | Berita Acara Survei Lapangan (BASL) atau Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Survei Lapangan (BATSL) | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| e. | Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| f. | Foto Objek | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| g. | Peta Kota/Kawasan Letak Objek Analisis | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| h. | Fotokopi Dokumen Legalitas, atau pengganti | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| i. | Analisis Perhitungan | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| j. | Dokumen Pendukung Lainnya. | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak Ada | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai |
| <u>Catatan:</u> | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| ... | | |
| 13. | LAINNYA | |
| a. | Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum Sesuai |
| b. | Format Penulisan (Arial 11, Spasi 1,15pt, Kertas A4) | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum Sesuai |
| <u>Catatan lainnya:</u> ... | | |
| <u>KESIMPULAN PENELAAH:</u> | | |
| ...(catatan berisi hasil penelaahan konsep analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial)... | | |
| Tanggal Pemaparan: ...(tanggal pelaksanaan pemaparan)... | | |
| Penelaah, ...(tanda tangan)... | | |
| ...(Nama)... | | |
| ...(Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah)... | | |

PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA
PENELAAHAN KONSEP LAPORAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK
EKONOMI SOSIAL

A. Kewenangan Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dan Kewenangan Penilai Pemerintah.

1. Penelaah melakukan penelaahan terhadap:
 - a. Kesesuaian kewenangan pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dengan kantor yang melakukan analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial; dan
 - b. Kesesuaian kewenangan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dengan kategori objek analisis, dalam hal dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang diketuai oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
2. Dalam hal kewenangan pelaksanaan analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dan/atau kewenangan Penilai Pemerintah diduga tidak sesuai, Penelaah melakukan konfirmasi terhadap Penilai Pemerintah yang menyusun Laporan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial.

B. Administrasi Laporan Analisis Objek.

Penelaah menandai ada atau tidak adanya suatu bagian sesuai dengan keberadaan bagian tersebut dalam konsep Laporan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial. Selanjutnya, Penelaah juga menandai sesuai atau tidak sesuaiya bagian tersebut, dengan memperhatikan indikator kesesuaian berikut:

1. Halaman Judul
 - a. Format Penomoran Laporan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomis Sosial
Indikator kesesuaian:
Penulisan format penomoran pada konsep Laporan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial sesuai dengan format penomoran pada ketentuan yang mengatur tentang standar/pedoman penyusunan laporan penilaian.

b. Jenis Objek Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial

Indikator kesesuaian:

Jenis objek yang dicantumkan sesuai dengan objek analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dalam permohonan dan/atau Berita Acara Survei Lapangan (BASL).

c. Nama Pemilik/Pengguna Objek Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial.

Indikator kesesuaian:

Nama pemilik/pengguna yang dicantumkan sesuai dengan permohonan dan/atau Berita Acara Survei Lapangan (BASL).

d. Alamat Objek Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial.

Indikator kesesuaian:

Alamat objek memuat nama jalan dan/atau nomor (jika ada), nama kelurahan atau desa, nama kecamatan, nama kabupaten/kota, dan nama provinsi.

e. Logo Kementerian Keuangan

Indikator kesesuaian:

Logo Kementerian Keuangan yang ditampilkan dalam halaman judul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang logo Kementerian Keuangan.

f. Tanggal Analisis

Indikator kesesuaian:

Tanggal Analisis ditulis dengan lengkap tanggal, bulan, dan tahun, sesuai dengan tanggal terakhir survei lapangan;

g. Instansi/Unit Kerja Asal Penilai Pemerintah

Indikator kesesuaian:

Unit kerja yang dicantumkan sesuai dengan unit kerja/kantor yang menerbitkan Laporan Analisis. Unit kerja dicantumkan sampai dengan unit eselon III pada Kantor Pelayanan dan sampai dengan unit eselon II pada Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

2. Pengantar dan Daftar Isi

a. Pemohon Analisis

Indikator kesesuaian:

Nama pemohon sesuai dengan surat permohonan/penugasan.

- b. Surat Permohonan/Penugasan
Indikator kesesuaian:
Nomor, tanggal dan perihal surat permohonan atau surat penugasan yang dicantumkan sesuai dengan surat permohonan/penugasan analisis.
 - c. Uraian dan Alamat Objek Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial
Indikator kesesuaian:
Uraian berisi deskripsi singkat atas objek analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial. Alamat objek memuat nama jalan dan/atau nomor (jika ada), nama kelurahan atau desa, nama kecamatan, nama kabupaten/kota, dan nama provinsi.
 - d. Tujuan Analisis
Indikator kesesuaian:
Jenis nilai dan tujuan analisis yang dicantumkan sesuai dengan permohonan/penugasan analisis.
 - e. Tanggal Analisis
Indikator kesesuaian:
Tanggal analisis pada pengantar harus sama dengan tanggal analisis pada halaman judul.
 - f. Hasil Analisis
Indikator kesesuaian:
Hasil analisis sesuai pada Ringkasan dan Kertas Kerja Analisis.
 - g. Daftar Isi
Indikator kesesuaian:
Daftar pokok bahasan dalam daftar isi sesuai dengan bagian-bagian dalam konsep Laporan Analisis dan mengikuti format pada standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian.
3. Pernyataan Penilai Pemerintah.
Indikator kesesuaian:
Pernyataan yang dicantumkan paling sedikit sesuai pengaturan pada standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian.

4. Asumsi dan Syarat Pembatas

Indikator kesesuaian:

Asumsi dan syarat pembatas yang dicantumkan paling sedikit sesuai pengaturan pada standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian.

5. Ringkasan Analisis

Indikator kesesuaian:

Ringkasan analisis memuat, antara lain informasi singkat tentang objek analisis, alamat objek analisis, nama pemilik, luas dan/atau jumlah objek analisis, jenis hak (jika ada), hasil analisis sesuai dengan isi Laporan Analisis dan standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian.

6. Lingkup Penugasan

a. Dasar Penugasan

1) Surat Keputusan

Indikator kesesuaian:

Nomor surat keputusan penunjukan Penilai Pemerintah/pembentukan tim Penilai yang dicantumkan sesuai dengan surat keputusan dalam lampiran.

2) Surat Tugas

Indikator kesesuaian:

Nomor surat tugas yang dicantumkan sesuai dengan surat tugas dalam lampiran.

b. Uraian dan Deskripsi Objek Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial

1) Legalitas Objek Analisis

Indikator kesesuaian:

Legalitas objek analisis diuraikan sesuai dengan data dan informasi yang tersedia dan mengikuti ketentuan dalam standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian.

2) Lokasi Objek Analisis

Indikator kesesuaian:

Lokasi objek analisis diuraikan sesuai dengan data dan informasi yang tersedia dan mengikuti ketentuan dalam standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian.

3) Deskripsi dan Identifikasi Objek Analisis

Indikator kesesuaian:

Deskripsi dan identifikasi objek analisis diuraikan sesuai dengan data dan informasi yang tersedia dan mengikuti ketentuan dalam standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian.

c. Jenis Mata Uang

Indikator kesesuaian:

Jenis mata uang yang digunakan dalam konsep Laporan Analisis sesuai dengan ketentuan dalam standar/pedoman penyusunan laporan Penilaian dan permohonan/penugasan.

d. Tujuan Analisis

Indikator kesesuaian:

Tujuan Analisis yang dicantumkan sesuai dengan permohonan/penugasan Penilaian.

e. Tanggal Survei Lapangan

Indikator kesesuaian:

Tanggal ditulis lengkap tanggal, bulan, dan tahun, sesuai dengan tanggal survei lapangan yang tercantum pada Berita Acara Survei Lapangan (BASL);

f. Tanggal Analisis

Indikator kesesuaian:

Tanggal Analisis ditulis dengan lengkap tanggal, bulan, dan tahun, sesuai dengan tanggal terakhir survei lapangan sebagaimana tersebut pada Berita Acara Survei Lapangan (BASL);

7. Tahapan Analisis

Indikator kesesuaian:

Tahapan Analisis ditulis dengan lengkap sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

8. Analisis Manfaat Ekonomi

Indikator kesesuaian:

Analisis Manfaat Ekonomi sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

9. Analisis Dampak Ekonomi

Indikator kesesuaian:

Analisis Dampak Ekonomi sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Keputusan Direktur Jenderal ini

10. Analisis Manfaat dan Dampak Sosial

Indikator kesesuaian:

Analisis Manfaat dan Dampak Sosial sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Keputusan Direktur Jenderal ini

11. Kesimpulan Analisis

Indikator kesesuaian:

Kesimpulan analisis diuraikan sesuai dengan hasil penjelasan dalam Laporan Analisis.

12. Lampiran

Penelaah melakukan penelaahan terhadap lampiran:

a. Surat Permohonan/Penugasan

Indikator kesesuaian:

Surat permohonan/penugasan yang dilampirkan sesuai dengan surat permohonan/penugasan yang diterima.

b. Fotokopi Surat Keputusan

Indikator kesesuaian:

Fotokopi surat keputusan pembentukan tim Penilai yang dilampirkan sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan.

c. Fotokopi Surat Tugas

Indikator kesesuaian:

Fotokopi surat tugas yang dilampirkan sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penilaian.

d. Berita Acara Survei Lapangan (BASL) atau Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Survei Lapangan (BATSL).

Indikator kesesuaian:

BASL atau BATSL dan BATKD yang dilampirkan memuat informasi sesuai dengan hasil pengumpulan data dan/atau informasi objek analisis.

e. Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)

Indikator kesesuaian:

BATKD yang dilampirkan memuat informasi kebutuhan tambahan data yang diperlukan atas objek analisis.

f. Foto Objek Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial

Indikator kesesuaian:

Foto yang dilampirkan sesuai dengan objek analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial.

g. Peta Kota/Kawasan Letak Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial

Indikator kesesuaian:

Peta kota/kawasan yang dilampirkan memuat informasi letak objek analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial sesuai dengan alamat objek Analisis.

h. Fotokopi Dokumen Legalitas, atau pengganti

Indikator kesesuaian:

Fotokopi dokumen legalitas yang dilampirkan sesuai dengan objek analisis. Dalam hal dokumen legalitas tidak ada, digantikan dengan dokumen pengganti sesuai ketentuan di bidang Penilaian.

i. Analisis Perhitungan

Indikator kesesuaian:

Analisis perhitungan sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

j. Dokumen Pendukung Lainnya, jika ada

Dokumen pendukung lainnya yang dilampirkan berisi data dan informasi lainnya terkait dengan objek analisis, sesuai dengan data dan informasi yang tersedia.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN



